

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- 1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.**

Kabupaten Tanah Bumbu tidak termasuk dalam kabupaten/kota penghitung Indeks Harga Konsumen. Perkembangan dan pengendalian inflasi di dasarkan pada hasil monitoring perkembangan harga kebutuhan bahan pokok dan penting di Pasar Pemerintah yang dilakukan setiap hari. Terdapat 2 (dua) Pasar Pemerintah yang dijadikan obyek monitoring masing-masing :

1. Pasar Niaga Bersujud kecamatan Simpang Empat
2. Pasar Raya Bumi Pangeran Kecamatan Kusan Hilir

Angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Tanah Bumbu di Triwulan IV Tahun 2025 cenderung mengalami kenaikan dibanding IPH Triwulan III. Angka IPH di bulan Oktober berada pada posisi -0,534% kemudian agak meningkat sedikit di bulan November di angka -0,0425% dan kembali naik di bulan Desember hingga mencapai 0,51 %.

Secara umum perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Tanah Bumbu pada Triwulan IV tahun 2025 mayoritas cenderung stabil. Hanya terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan terutama komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga sepanjang tahun seperti cabe merah keriting, cabe rawit dan bawang merah.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan terus menerus selama triwulan IV adalah sebagai berikut ;

36. **Bawang Merah** pada bulan Oktober memiliki harga rata-rata Rp. 36.345,- naik di bulan November menjadi Rp. 38.000,- dan naik lagi di Desember menjadi Rp. 40.810,-.
37. **Cabe Merah Keriting** pada bulan Oktober memiliki harga rata-rata Rp. 50.000,-, di bulan November tetap diharga Rp. 50.000,- dan mengalami kenaikan di Desember menjadi Rp. 70.2380,-.
38. **Cabe Rawit Merah** pada bulan Oktober memiliki harga rata-rata Rp. 60.000,-, di bulan November tetap diharga Rp. 60.000,- dan mengalami kenaikan di Desember menjadi Rp. 72.952,-.

Adapun komoditas yang mengalami fluktuasi harga selama triwulan IV adalah **Cabe Merah Besar** yang pada bulan Oktober memiliki harga rata-rata Rp. 55.217,-, turun di bulan November menjadi Rp. 51.500,- dan mengalami kenaikan di bulan Desember menjadi Rp. 73.333,-

Sementara kondisi harga yang cenderung stabil selama Triwulan IV 2025 ini adalah **Beras Premium** yang memiliki harga rata-rata Rp. 16.000,-, **Beras Medium** di harga Rp. 12.667,-, **Cabe Rawit Hijau** memiliki harga rata-rata Rp. 50.000,-, **Gula pasir kemasan** di harga rata-rata Rp. 20.000,-, **Minyak goreng sawit kemasan premium** yang memiliki harga rata-rata Rp. 18.000,-, **Minyakita** di harga rata-rata Rp. 17.000,-, **Daging Ayam Ras** di harga Rp. 29.000,-, **Telur Ayam Ras** memiliki harga rata-rata Rp. 29.000,-, **Daging Sapi** di harga Rp.160.000,-, **Mie Instant** di harga rata-rata Rp. 3.000,-, dan **Susu Bubuk Balita** di harga rata-rata Rp. 42.900,-.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- 2.
3. Pada Triwulan IV Tahun 2025, kondisi inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kecenderungan meningkat, yang tercermin dari kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH), khususnya pada bulan Desember 2025. Kenaikan IPH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:
4. Peningkatan permintaan musiman (seasonal demand) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama terhadap komoditas bahan pangan pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng.
5. Gangguan distribusi dan pasokan, baik akibat faktor cuaca maupun peningkatan volume permintaan dalam waktu yang relatif singkat.
6. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis, terutama komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan.
7. Keterbatasan kapasitas produksi lokal untuk beberapa komoditas pangan sehingga masih bergantung pada pasokan dari daerah lain, yang menyebabkan harga mudah terpengaruh oleh kondisi regional dan nasional.

Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan langkah pengendalian inflasi yang efektif dan terkoordinasi. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok penting selama Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan beberapa kebijakan dan kegiatan strategis, yaitu:

Kegiatan pemantauan penyaluran Bapang adalah garda terdepan dalam menjaga integritas program bantuan sosial. Melalui pemantauan yang efektif, potensi masalah seperti data ganda, pungutan liar, atau kualitas buruk dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Hasil dari pemantauan menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan mekanisme distribusi. Dengan demikian, program Bapang tidak hanya menjadi penyangga ekonomi, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara yang melayani warganya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Foto Kegiatan

Verifikasi kios pangan daerah mitra Bulog dalam rangka penyaluran beras SPHP Program **Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)** yang diinisiasi oleh Perum Bulog adalah intervensi strategis pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras medium dan mengendalikan harganya di tingkat konsumen. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas jaringan distribusinya di hilir, yaitu melalui kios-kios pangan di pasar tradisional. Untuk memastikan jaringan ini kredibel dan berfungsi optimal, kegiatan **verifikasi kios pangan calon mitra** menjadi langkah awal yang fundamental. Verifikasi ini bertujuan untuk menyeleksi dan menetapkan mitra yang tepat, sehingga penyaluran beras SPHP dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan akuntabel.

Verifikasi kios pangan bukan sekadar formalitas, melainkan pilar penting untuk menjamin efektivitas program SPHP. Dengan proses seleksi yang ketat, Bulog membangun jaringan distribusi yang andal dan terpercaya. Kios mitra yang terverifikasi menjadi ujung tombak pemerintah dalam menstabilkan harga beras, memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau, dan pada akhirnya, turut menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Foto Kegiatan

Monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan bahan pokok. **Kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok** adalah dua pilar utama yang menopang ketahanan pangan nasional dan stabilitas ekonomi suatu daerah. Fluktuasi harga yang tajam atau kelangkaan pasokan dapat secara langsung memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, kegiatan **monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin dan sistematis** bukanlah sekadar pengumpulan data, melainkan sebuah sistem peringatan dini (early warning system) yang krusial bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang cepat dan tepat.

Monitoring dan evaluasi harga dan pasokan bahan pokok adalah **jantung dari sistem ketahanan pangan**. Kegiatan ini memungkinkan pemerintah untuk beralih dari sikap reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi dinamika pasar. Dengan data yang solid, intervensi yang dilakukan menjadi lebih terukur dan efektif, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen serta menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Foto Kegiatan

Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah program intervensi pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Daerah, sebagai respons cepat terhadap gejolak harga pangan di tingkat konsumen. Salah satu komoditas utama yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah **beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)**. Di tengah tren kenaikan harga beras di pasaran, GPM hadir sebagai solusi taktis untuk memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga masyarakat dapat membeli beras berkualitas dengan harga terjangkau, langsung dari sumbernya, yaitu Perum Bulog.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi daerah, yang seringkali dipicu oleh volatilitas harga beras. Gerakan Pangan Murah untuk beras SPHP adalah instrumen hilir yang efektif dalam program stabilisasi pangan nasional. Kegiatan ini tidak hanya berhasil meredam gejolak harga secara temporer, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah secara aktif bekerja untuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Keberlanjutan GPM menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Foto Kegiatan

Monitoring Tanam Sayuran / Hortikultura, pengembangan sektor hortikultura, khususnya tanaman sayuran, memegang peranan vital dalam diversifikasi pangan, pemenuhan gizi masyarakat, serta peningkatan pendapatan petani. Program bantuan bibit, urban farming, atau pengembangan kawasan hortikultura seringkali menjadi andalan pemerintah. Namun, keberhasilan program tersebut tidak berhenti setelah bibit atau sarana produksi disalurkan. Diperlukan sebuah proses pengawalan yang sistematis, yaitu melalui **kegiatan monitoring tanam**. Monitoring ini adalah jembatan yang menghubungkan antara perencanaan program dengan hasil panen yang diharapkan, memastikan setiap sumber daya yang diinvestasikan memberikan hasil yang optimal.

Monitoring tanam sayuran bukanlah aktivitas pengawasan semata, melainkan sebuah bentuk pendampingan aktif. Dari hasil monitoring, dapat dirumuskan tindak lanjut yang konkret, seperti rekomendasi pemupukan yang tepat, saran pengendalian hama terpadu, atau fasilitasi bantuan jika terjadi masalah serius seperti kekeringan. Dengan monitoring yang efektif, potensi kerugian dapat ditekan, produktivitas dapat ditingkatkan, dan pada akhirnya, tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal dan kesejahteraan petani dapat tercapai.

Foto Kegiatan

Pemantauan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) adalah pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengendalikan inflasi. Kegiatan pemantauan SPHP merupakan upaya proaktif pemerintah untuk memastikan bahwa komoditas pangan strategis tersedia dalam jumlah yang cukup untuk masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau. Pemantauan ini bukan sekadar aktivitas pencatatan data, melainkan sebuah sistem kewaspadaan dini yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah intervensi yang cepat dan terukur sebelum terjadi gejolak di pasar yang dapat meresahkan masyarakat.

Kegiatan pemantauan SPHP adalah jantung dari manajemen ketahanan pangan modern. Melalui pemantauan yang konsisten dan terstruktur, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi makro, melindungi daya beli masyarakat, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha di sektor pangan. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap warga negara dapat mengakses pangan yang cukup dan terjangkau.

Foto Kegiatan

Bakti Sosial Pasar Murah dalam rangka pembukaan TMMD ke- 126 TA 2025. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan

rakyat untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. Sebagai penanda dimulainya program TMMD ke-126 Tahun Anggaran 2025, diselenggarakan kegiatan bazar sembako murah. Kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah "ketukan pintu" yang simpatik dari Satgas TMMD kepada masyarakat di lokasi sasaran. Bazar sembako murah ini menjadi simbol bahwa kehadiran TNI di tengah-tengah mereka membawa manfaat langsung yang dapat dirasakan, bahkan sejak hari pertama program dibuka secara resmi.

Kegiatan bazar sembako murah secara nyata, telah membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara TNI dan rakyat. Keberhasilan acara ini menjadi modal sosial yang sangat berharga, menciptakan iklim yang kondusif dan dukungan penuh dari masyarakat untuk menyukseskan seluruh rangkaian program TMMD ke-126 TA 2025, baik sasaran fisik maupun non-fisik.

Foto Kegiatan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Koordinasi TPID berjalan dengan baik, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi musiman menjelang HBKN.
2. Monitoring harga dan ketersediaan barang cukup efektif dalam memberikan gambaran kondisi pasar secara aktual sehingga pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif.
3. Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah mampu membantu menahan laju kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan tekanan inflasi akibat faktor musiman.
4. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta keterbatasan intervensi jangka panjang terhadap sisi produksi dan distribusi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu ke depan, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan produksi pangan lokal, khususnya komoditas penyumbang inflasi utama, melalui dukungan kepada petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.
2. Peningkatan intensitas dan cakupan monitoring harga, termasuk pemanfaatan sistem informasi harga pangan secara real time.
3. Penguatan kerja sama antar daerah, terutama daerah penghasil pangan, guna menjamin kelancaran pasokan dan stabilitas harga.
4. Perencanaan intervensi pasar yang lebih dini, terutama menjelang HBKN, agar tekanan inflasi dapat ditekan sejak awal.

Penguatan peran TPID secara berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas SDM,

5.

koordinasi lintas sektor, serta evaluasi rutin terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak termasuk dalam kabupaten/kota penghitung Indeks Harga Konsumen. Perkembangan dan pengendalian inflasi di dasarkan pada hasil monitoring perkembangan harga kebutuhan bahan pokok dan penting di Pasar Pemerintah yang dilakukan setiap hari. Terdapat 2 (dua) Pasar Pemerintah yang dijadikan obyek monitoring masing-masing :

1. Pasar Niaga Bersujud kecamatan Simpang Empat
2. Pasar Raya Bumi Pangeran Kecamatan Kusan Hilir

Angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Tanah Bumbu di Triwulan IV Tahun 2025 cenderung mengalami kenaikan dibanding IPH Triwulan III. Angka IPH di bulan Oktober berada pada posisi -0,534% kemudian agak meningkat sedikit di bulan November di angka -0,0425% dan kembali naik di bulan Desember hingga mencapai 0,51 %.

Secara umum perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Tanah Bumbu pada Triwulan IV tahun 2025 mayoritas cenderung stabil. Hanya terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan terutama komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga sepanjang tahun seperti cabe merah keriting, cabe rawit dan bawang merah.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan terus menerus selama triwulan IV adalah sebagai berikut ;

36. **Bawang Merah** pada bulan Oktober memiliki harga rata-rata Rp. 36.345,- naik di bulan November menjadi Rp. 38.000,- dan naik lagi di Desember menjadi Rp. 40.810,-.
37. **Cabe Merah Keriting** pada bulan Oktober memiliki harga rata-rata Rp. 50.000,-, di bulan November tetap diharga Rp. 50.000,- dan mengalami kenaikan di Desember menjadi Rp. 70.2380,-.
38. **Cabe Rawit Merah** pada bulan Oktober memiliki harga rata-rata Rp. 60.000,-, di bulan November tetap diharga Rp. 60.000,- dan mengalami kenaikan di Desember menjadi Rp. 72.952,-.

Adapun komoditas yang mengalami fluktuasi harga selama triwulan IV adalah **Cabe Merah Besar** yang pada bulan Oktober memiliki harga rata-rata Rp. 55.217,-, turun di bulan November menjadi Rp. 51.500,- dan mengalami kenaikan di bulan Desember menjadi Rp. 73.333,-

Sementara kondisi harga yang cenderung stabil selama Triwulan IV 2025 ini adalah **Beras Premium** yang memiliki harga rata-rata Rp. 16.000,-, **Beras Medium** di harga Rp. 12.667,-, **Cabe Rawit Hijau** memiliki harga rata-rata Rp. 50.000,-, **Gula pasir kemasan** di harga rata-rata Rp. 20.000,-, **Minyak goreng sawit kemasan premium** yang memiliki harga rata-rata Rp. 18.000,-, **Minyakita** di harga rata-rata Rp. 17.000,-, **Daging Ayam Ras** di harga Rp. 29.000,-, **Telur Ayam Ras** memiliki harga rata-rata Rp. 29.000,-, **Daging Sapi** di harga Rp.160.000,-, **Mie Instant** di harga rata-rata Rp. 3.000,-, dan **Susu Bubuk Balita** di harga rata-rata Rp. 42.900,-.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, kondisi inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kecenderungan meningkat, yang tercermin dari kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH), khususnya pada bulan Desember 2025. Kenaikan IPH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a) Peningkatan permintaan musiman (seasonal demand) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama terhadap komoditas bahan pangan pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng.
- b) Gangguan distribusi dan pasokan, baik akibat faktor cuaca maupun peningkatan volume permintaan dalam waktu yang relatif singkat.
- c) Fluktuasi harga komoditas pangan strategis, terutama komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan.
- d) Keterbatasan kapasitas produksi lokal untuk beberapa komoditas pangan sehingga masih bergantung pada pasokan dari daerah lain, yang menyebabkan harga mudah terpengaruh oleh kondisi regional dan nasional.

Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan langkah pengendalian inflasi yang efektif dan terkoordinasi. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, kondisi inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kecenderungan meningkat, yang tercermin dari kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH), khususnya pada bulan Desember 2025. Kenaikan IPH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a) Peningkatan permintaan musiman (seasonal demand) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama terhadap komoditas bahan pangan pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng.
- b) Gangguan distribusi dan pasokan, baik akibat faktor cuaca maupun peningkatan volume permintaan dalam waktu yang relatif singkat.
- c) Fluktuasi harga komoditas pangan strategis, terutama komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan.
- d) Keterbatasan kapasitas produksi lokal untuk beberapa komoditas pangan sehingga masih bergantung pada pasokan dari daerah lain, yang menyebabkan harga mudah terpengaruh oleh kondisi regional dan nasional.

Kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan

langkah pengendalian inflasi yang efektif dan terkoordinasi. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok penting selama Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan beberapa kebijakan dan kegiatan strategis, yaitu:

a) Kegiatan pemantauan penyaluran Bapang adalah garda terdepan dalam menjaga integritas program bantuan sosial. Melalui pemantauan yang efektif, potensi masalah seperti data ganda, pungutan liar, atau kualitas buruk dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Hasil dari pemantauan menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan mekanisme distribusi. Dengan demikian, program Bapang tidak hanya menjadi penyangga ekonomi, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara yang melayani warganya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Foto Kegiatan

b) Verifikasi kios pangan daerah mitra Bulog dalam rangka penyaluran beras SPHP Program **Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)** yang diinisiasi oleh Perum Bulog adalah intervensi strategis pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras medium dan mengendalikan harganya di tingkat konsumen. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas jaringan distribusinya di hilir, yaitu melalui kios-kios pangan di pasar tradisional. Untuk memastikan jaringan ini kredibel dan berfungsi optimal, kegiatan **verifikasi kios pangan calon mitra** menjadi langkah awal yang fundamental. Verifikasi ini bertujuan untuk menyeleksi dan menetapkan mitra yang tepat, sehingga penyaluran beras SPHP dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan akuntabel.

Verifikasi kios pangan bukan sekadar formalitas, melainkan pilar penting untuk menjamin efektivitas program SPHP. Dengan proses seleksi yang ketat, Bulog membangun jaringan distribusi yang andal dan terpercaya. Kios mitra yang terverifikasi menjadi ujung tombak pemerintah dalam menstabilkan harga beras, memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau, dan pada akhirnya, turut menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Foto Kegiatan

c) Monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan bahan pokok. **Kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok** adalah dua pilar utama yang menopang ketahanan pangan nasional dan stabilitas ekonomi suatu daerah. Fluktuasi harga yang tajam atau kelangkaan pasokan dapat secara langsung memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan

berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, kegiatan **monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin dan sistematis** bukanlah sekadar pengumpulan data, melainkan sebuah sistem peringatan dini (early warning system) yang krusial bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang cepat dan tepat.

Monitoring dan evaluasi harga dan pasokan bahan pokok adalah **jantung dari sistem ketahanan pangan**. Kegiatan ini memungkinkan pemerintah untuk beralih dari sikap reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi dinamika pasar. Dengan data yang solid, intervensi yang dilakukan menjadi lebih terukur dan efektif, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen serta menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Foto Kegiatan

d) Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah program intervensi pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Daerah, sebagai respons cepat terhadap gejolak harga pangan di tingkat konsumen. Salah satu komoditas utama yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah **beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)**. Di tengah tren kenaikan harga beras di pasaran, GPM hadir sebagai solusi taktis untuk memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga masyarakat dapat membeli beras berkualitas dengan harga terjangkau, langsung dari sumbernya, yaitu Perum Bulog.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi daerah, yang seringkali dipicu oleh volatilitas harga beras. Gerakan Pangan Murah untuk beras SPHP adalah instrumen hilir yang efektif dalam program stabilisasi pangan nasional. Kegiatan ini tidak hanya berhasil meredam gejolak harga secara temporer, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah secara aktif bekerja untuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Keberlanjutan GPM menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Foto Kegiatan

e) Monitoring Tanam Sayuran / Hortikultura, pengembangan sektor hortikultura, khususnya tanaman sayuran, memegang peranan vital dalam diversifikasi pangan, pemenuhan gizi masyarakat, serta peningkatan pendapatan petani. Program bantuan bibit, urban farming, atau pengembangan kawasan hortikultura seringkali menjadi andalan pemerintah. Namun, keberhasilan program tersebut tidak berhenti setelah bibit atau sarana produksi disalurkan. Diperlukan sebuah proses pengawalan yang sistematis, yaitu melalui **kegiatan monitoring tanam**. Monitoring ini adalah jembatan yang menghubungkan antara perencanaan program dengan hasil panen yang diharapkan, memastikan setiap sumber daya yang diinvestasikan memberikan hasil yang optimal.

Monitoring tanam sayuran bukanlah aktivitas pengawasan semata, melainkan sebuah bentuk

pendampingan aktif. Dari hasil monitoring, dapat dirumuskan tindak lanjut yang konkret, seperti rekomendasi pemupukan yang tepat, saran pengendalian hama terpadu, atau fasilitasi bantuan jika terjadi masalah serius seperti kekeringan. Dengan monitoring yang efektif, potensi kerugian dapat ditekan, produktivitas dapat ditingkatkan, dan pada akhirnya, tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal dan kesejahteraan petani dapat tercapai.

Foto Kegiatan

f) Pemantauan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) adalah pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengendalikan inflasi. Kegiatan pemantauan SPHP merupakan upaya proaktif pemerintah untuk memastikan bahwa komoditas pangan strategis tersedia dalam jumlah yang cukup untuk masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau. Pemantauan ini bukan sekadar aktivitas pencatatan data, melainkan sebuah sistem kewaspadaan dini yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah intervensi yang cepat dan terukur sebelum terjadi gejolak di pasar yang dapat meresahkan masyarakat.

Kegiatan pemantauan SPHP adalah jantung dari manajemen ketahanan pangan modern. Melalui pemantauan yang konsisten dan terstruktur, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi makro, melindungi daya beli masyarakat, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha di sektor pangan. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap warga negara dapat mengakses pangan yang cukup dan terjangkau.

Foto Kegiatan

g) Bakti Sosial Pasar Murah dalam rangka pembukaan TMMD ke- 126 TA 2025. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat untuk akselerasi pembangunan di daerah. Sebagai penanda dimulainya program TMMD ke-126 Tahun Anggaran 2025, diselenggarakan kegiatan bazar sembako murah. Kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah "ketukan pintu" yang simpatik dari Satgas TMMD kepada masyarakat di lokasi sasaran. Bazar sembako murah ini menjadi simbol bahwa kehadiran TNI di tengah-tengah mereka membawa manfaat langsung yang dapat dirasakan, bahkan sejak hari pertama program dibuka secara resmi.

Kegiatan bazar sembako murah secara nyata, telah membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara TNI dan rakyat. Keberhasilan acara ini menjadi modal sosial yang sangat berharga, menciptakan iklim yang kondusif dan dukungan penuh dari masyarakat untuk sukseskan seluruh rangkaian program TMMD ke-126 TA 2025, baik sasaran fisik maupun non-fisik.